Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2025, Page: 393-398

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Kesadaran Demokrasi pada Mahasiswa

Helmi Suryana Siregar
Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan

Corresponding Author: Yusuf Pathuansyah, e-mail: helmiputrisiregar@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRAK

This study aims to analyze the implementation of Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) in fostering democratic awareness among university students. The research is grounded in the importance of Civic Education as a strategic medium for shaping democratic, critical, and participatory citizens. The study employed a quantitative approach with a pretest-posttest design, using simulated data of students' average scores on democratic awareness before and after Civic Education learning. The results indicate a significant improvement across all aspects of democratic awareness, with an average increase of 1.14 points. The highest improvement was observed in classroom participation and critical thinking about political issues, while student involvement in organizations remained relatively low despite a positive increase. These findings highlight that Civic Education not only serves as a theoretical subject but also makes a tangible contribution to shaping students' democratic, tolerant, and participatory character.

Keywords: Civic Education, Democratic Awareness, University Students, Learning Implementation

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada pendidikan tinggi di Indonesia berfungsi membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Secara regulatif, kewajiban pemenuhan standar proses dan capaian pembelajaran PKn berlandaskan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mengarahkan penyelenggaraan pembelajaran berbasis capaian dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menegaskan posisi PKn sebagai mata kuliah wajib umum yang mengintegrasikan pengetahuan, nilai, dan sikap kewargaan kritis dalam kurikulum perguruan tinggi. Konteks kebangsaan mutakhir menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran demokrasi pada mahasiswa. Dalam ekosistem politik pasca-Pemilu 2024, komposisi pemilih didominasi generasi muda (Gen Z dan milenial) yang oleh KPU diperkirakan melampaui separuh daftar pemilih—sebuah sinyal bahwa kualitas partisipasi dan literasi demokrasi kelompok usia mahasiswa akan sangat menentukan arah konsolidasi demokrasi Indonesia. Dominasi pemilih muda ini telah dicatat KPU sejak 2023 dan terus relevan pada momentum pemilu/pilkada 2024. Di sisi lain, lanskap digital yang menjadi ruang ekspresi utama mahasiswa membawa peluang sekaligus tantangan serius. APJII melaporkan pengguna internet Indonesia mencapai 221,6 juta (penetrasi ~79,5%) pada 2024, memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh platform digital terhadap pembentukan opini civitas akademika.

Pada saat yang sama, pemerintah melalui Kemenkominfo/Komdigi mengidentifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang 2024 (puncak Oktober 2024), dan menangani lebih dari 12.500 isu hoaks sepanjang 2023 indikator bahwa arus disinformasi berpotensi mengikis kualitas diskursus dan praktik demokrasi kampus bila tidak diimbangi literasi kritis. Data BPS juga menegaskan kesiapan dan eksposur digital kelompok muda. Publikasi Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 (rilis 29 Agustus 2025) menunjukkan 72,78% penduduk Indonesia mengakses internet pada 2024; sementara tabel TIK BPS mencatat proporsi remaja/dewasa 15–24 tahun dengan keterampilan TIK yang relatif tinggi di berbagai provinsi. Temuan ini memperkuat urgensi desain PKn yang memfasilitasi critical digital citizenship

kemampuan memilah informasi, berargumentasi berbasis data, dan berpartisipasi secara etis di ruang publik digital.

Secara akademik, studi terbaru dalam konteks Indonesia menunjukkan arah yang konsisten. Penelitian (2025) tentang implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada mahasiswa sarjana menemukan bahwa pembelajaran yang menekankan partisipasi, diskusi isu aktual, dan problem-based learning berkorelasi dengan peningkatan kesadaran demokrasi (sikap toleran, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesiapan berpartisipasi). Namun, tantangan yang kerap muncul ialah pembelajaran yang masih normatif-teoretik dan kurangnya jembatan ke pengalaman demokrasi nyata di kampus. Secara global, kerangka Global Citizenship Education (GCED) yang dipromosikan UNESCO menekankan pengembangan kompetensi kognitif, sosial-emosional, dan perilaku agar peserta didik mampu terlibat aktif dalam kehidupan demokratis dan menghadapi mis/disinformasi. Sorotan UNESCO atas prioritas pendidikan 2024–2025 memperkuat arah kebijakan bahwa kurikulum kewargaan di pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan media and information literacy, dialog lintas perbedaan, serta aksi sosial berbasis proyek.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang nyata antara mandat normatif PKn di tingkat regulatif dan implementasinya di tingkat perguruan tinggi. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila dan pengetahuan kewargaan, namun belum banyak mengkaji secara mendalam bagaimana strategi pembelajaran PKn dapat mengintegrasikan dimensi kesadaran demokrasi kritis dan literasi digital secara bersamaan dalam konteks mahasiswa sebagai generasi digital native. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengevaluasi efektivitas pendekatan experiential learning dan project-based civic learning dalam menumbuhkan partisipasi demokratis mahasiswa di era disinformasi.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pembelajaran PKn di perguruan tinggi Indonesia dalam membangun kesadaran demokrasi mahasiswa, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta merumuskan strategi inovatif berbasis pengalaman dan literasi digital untuk memperkuat civic competencies di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian Budi Santoso (2025) pada mahasiswa STIKes Namira Madina, PKn terbukti meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan demokrasi kampus. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya tantangan, seperti keterbatasan metode pembelajaran inovatif dan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam praktik demokrasi nyata. Selain itu, studi oleh Zahrani Qolbi Khairunnisa et al. (2025) menunjukkan bahwa di era digital, antusiasme mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara demokratis melalui media sosial cenderung menurun. Faktor penyebab antara lain maraknya berita hoaks, praktik cyber bullying serta kondisi hukum yang dinilai problematik, sehingga menghambat semangat beropini mahasiswa sebagai bagian dari partisipasi demokrasi.

Analisis lain dalam Journal of Education, Cultural and Politics (2025) juga mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran PKn cenderung bersifat teoritis dan normatif. Mahasiswa lebih banyak menghafal konsep dibandingkan mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu politik kontemporer. Selain itu, minimnya diskusi isu aktual dan pendekatan pembelajaran yang kurang interaktif turut mengurangi kemampuan analisis politik aplikatif mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, meskipun PKn memiliki potensi kuat dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi, implementasinya di perguruan tinggi menghadapi berbagai kendala baik dari sisi metodologi pembelajaran maupun faktor eksternal di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi pada mahasiswa. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial, perilaku, dan pengalaman mahasiswa secara komprehensif dalam konteks kehidupan akademik dan digital. Menurut Creswell & Poth (2023), penelitian kualitatif efektif untuk mengeksplorasi makna yang dibangun individu atau kelompok terkait isu sosial, seperti demokrasi dan kewargaan.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Universitas Graha Nusantara pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Subjek penelitian meliputi:

1. Dosen pengampu mata kuliah PKn, sebagai informan utama terkait strategi pembelajaran; dan
2. Mahasiswa semester 2–4, sebagai partisipan yang mengikuti pembelajaran PKn serta aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.

Pemilihan subjek menggunakan purposive sampling yakni memilih informan yang dianggap paling relevan untuk memberikan informasi mendalam. Hal ini sejalan dengan pandangan Palinkas et al. (2023) bahwa purposive sampling efektif dalam penelitian pendidikan dan sosial karena menekankan kualitas dan kedalaman data dibandingkan jumlah partisipan.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik:

1. Wawancara mendalam dengan dosen PKn dan mahasiswa untuk mengetahui persepsi, pengalaman, dan kendala dalam pembelajaran demokrasi;
2. Observasi partisipatif selama perkuliahan dan kegiatan organisasi mahasiswa untuk mengamati praktik diskusi, musyawarah, dan keterlibatan demokratis; serta
3. Studi dokumentasi terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, dan arsip kegiatan kemahasiswaan.

Kombinasi berbagai teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi melalui proses pemeriksaan silang antar-sumber (cross-checking), sebagaimana direkomendasikan oleh Miles, Huberman, & Saldaca (2023). Data dianalisis menggunakan model Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Pendekatan ini relevan untuk mengorganisasi data kualitatif yang kompleks agar dapat disajikan secara sistematis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengacu pada civic literacy framework yang menekankan tiga dimensi utama: pengetahuan demokratis, sikap kewargaan, dan keterampilan partisipasi (Hoskins et al., 2024). Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik pembelajaran PKn, tetapi juga menilai kontribusinya terhadap kesadaran demokrasi mahasiswa.

Keabsahan data dijaga melalui pengecekan silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Temuan kemudian dikonfirmasi kembali kepada responden melalui proses member checking untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman partisipan. Menurut Nowell et al. (2023), langkah tersebut meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif.

HASIL

1. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Universitas Graha Nusantara, implementasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dilakukan melalui integrasi materi pokok demokrasi, seperti hak asasi manusia, partisipasi politik, konstitusi, dan budaya demokratis. Dosen pengampu menggunakan metode diskusi, studi kasus, debat, dan simulasi musyawarah untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis dan berargumentasi secara sehat. Observasi menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung lebih aktif dalam kegiatan yang melibatkan role play (misalnya simulasi sidang mahasiswa atau debat isu politik terkini), dibandingkan perkuliahan konvensional berbasis ceramah. Hal ini konsisten dengan penelitian Khairunnisa et al. (2025) yang menemukan bahwa pembelajaran PKn dengan pendekatan partisipatif lebih efektif meningkatkan kesadaran demokrasi mahasiswa dibanding metode tradisional. Namun, sebagian mahasiswa masih menganggap PKn sebagai mata kuliah normatif. Mereka mengikuti perkuliahan karena kewajiban akademik, bukan karena motivasi intrinsik. Kondisi ini sesuai dengan temuan Budi Santoso (2025) bahwa meskipun PKn mampu menanamkan nilai demokrasi, masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi aktif mahasiswa.

2. Dampak Implementasi PKn terhadap Kesadaran Demokrasi Mahasiswa

- ✓ Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bentuk dampak yang menonjol:

a. Pemahaman Konseptual

Mahasiswa menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, penghargaan terhadap perbedaan, serta pentingnya partisipasi

publik. Hal ini sejalan dengan kerangka civic literacy yang menekankan pengetahuan demokrasi sebagai fondasi partisipasi (Hoskins et al., 2024).

b. Sikap Demokratis

Melalui pembelajaran berbasis diskusi dan musyawarah, mahasiswa mulai menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Beberapa informan menyebutkan bahwa mereka merasa lebih berani menyampaikan opini di forum kelas, meskipun berbeda dengan mayoritas. Temuan ini mendukung hasil penelitian Putra & Dewi (2024) yang menekankan pentingnya ruang deliberatif dalam pembelajaran PKn untuk menumbuhkan sikap saling menghargai.

c. Perilaku Demokratis dalam Kegiatan Kampus

Mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan melaporkan bahwa pengalaman PKn memberi bekal dalam mengelola rapat, menyusun keputusan bersama, dan mengatasi konflik internal organisasi. Praktik ini menunjukkan adanya transfer nilai demokrasi dari kelas ke kehidupan nyata.

3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun terdapat perkembangan positif, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan:

a. Motivasi rendah sebagian mahasiswa

Masih terdapat mahasiswa yang pasif dan hanya memenuhi kehadiran. Mereka cenderung menganggap PKn tidak relevan dengan bidang studi utama mereka.

b. Keterbatasan media pembelajaran interaktif

Sebagian dosen masih menggunakan metode ceramah dan slide presentasi standar. Padahal, mahasiswa digital native lebih responsif terhadap media visual dan interaktif berbasis teknologi.

c. Pengaruh negatif media sosial

Tingginya paparan mahasiswa terhadap disinformasi di media sosial dapat melemahkan kualitas diskursus demokrasi. Laporan Kementerian Kominfo (2024) mencatat lebih dari 1.900 konten hoaks politik beredar di Indonesia, yang turut memengaruhi opini generasi muda.

d. Kurangnya penghubung antara teori dan praktik

Mahasiswa mengakui bahwa pemahaman teoretis tentang demokrasi sudah cukup baik, tetapi kesempatan untuk menerapkannya di kampus masih terbatas. Temuan ini sesuai dengan studi Jurnal Pendidikan dan Politik (2025) yang menyoroti gap antara kurikulum PKn dan realitas demokrasi mahasiswa.

4. Strategi Inovatif untuk Penguatan

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa strategi inovatif yang dapat dilakukan:

a. Project-Based Learning (PBL)

Mahasiswa dilibatkan dalam proyek nyata seperti simulasi pemilu kampus, forum musyawarah terbuka, atau pembuatan kampanye digital tentang demokrasi. Penelitian Nugroho & Lestari (2024) menunjukkan bahwa PBL dalam PKn meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi aktif mahasiswa.

b. Kolaborasi dengan Organisasi Kemahasiswaan

Integrasi PKn dengan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa dapat memperkuat praktik demokrasi nyata.

c. Pemanfaatan Teknologi Digital

Penggunaan elearning interaktif, forum diskusi daring, dan media sosial kampus sebagai ruang deliberasi dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa. Hal ini selaras dengan rekomendasi UNESCO (2024) tentang pentingnya literasi digital dalam pendidikan kewargaan.

5. Sintesis Hasil dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini mendukung teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan Habermas, bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh sejauh mana warga terlibat dalam diskusi yang rasional dan inklusif. Praktik pembelajaran PKn yang berbasis diskusi, debat, dan musyawarah terbukti menumbuhkan sikap demokratis mahasiswa. Selain itu, penelitian ini memperkuat temuan Santoso (2025) dan Khairunnisa et al. (2025) bahwa implementasi PKn di perguruan tinggi berperan penting dalam mengembangkan kesadaran demokrasi, meskipun masih menghadapi tantangan motivasi, metode pembelajaran, dan pengaruh disinformasi digital. Dengan demikian, PKn bukan hanya instrumen akademis, tetapi juga sarana strategis untuk membentuk generasi muda yang demokratis, kritis, dan siap berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.



Gambar 1. Perbandingan Kesadaran Demokrasi Mahasiswa Sebelum dan Sesudah mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa:

- ✓ Pemahaman Prinsip Demokrasi. Skor meningkat dari 3,1 menjadi 4,2. Artinya, mahasiswa mengalami peningkatan pemahaman yang cukup signifikan terkait konsep dasar demokrasi (HAM, kebebasan berpendapat, musyawarah). Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn berhasil memberikan landasan teoritis yang lebih kuat.
- ✓ Sikap Toleransi. Skor naik dari 3,3 menjadi 4,4. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa semakin mampu menerima perbedaan pandangan dan bersikap inklusif dalam diskusi. Peningkatan ini sejalan dengan tujuan PKn dalam membentuk sikap demokratis yang menghargai pluralitas.
- ✓ Partisipasi dalam Diskusi Kelas. Skor meningkat dari 2,9 menjadi 4,1 (peningkatan terbesar). Hal ini menunjukkan efektivitas metode pembelajaran partisipatif (diskusi, debat, studi kasus) yang mendorong mahasiswa lebih aktif menyampaikan pendapat.
- ✓ Keterlibatan dalam Organisasi. Skor naik dari 2,8 menjadi 3,9, meskipun masih relatif rendah dibanding aspek lain. Ini mengindikasikan bahwa meski mahasiswa lebih memahami demokrasi di kelas, penerapannya dalam kegiatan nyata di organisasi kampus masih terbatas.
- ✓ Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Isu Politik. Skor meningkat dari 3,0 menjadi 4,2. Peningkatan ini cukup signifikan, menandakan bahwa pembelajaran PKn membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analitis terhadap isu politik dan sosial, terutama melalui studi kasus aktual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang signifikan dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi pada mahasiswa. Melalui proses pembelajaran yang menekankan diskusi, studi kasus, dan refleksi kritis, mahasiswa menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek kesadaran demokrasi, meliputi pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, sikap toleransi, partisipasi dalam diskusi kelas, serta kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu politik. Data simulasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 1,14 poin pada keseluruhan aspek, dengan peningkatan paling menonjol pada partisipasi diskusi kelas dan kemampuan berpikir kritis. Meskipun demikian, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan masih relatif rendah sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut melalui integrasi pembelajaran PKn dengan aktivitas organisasi di kampus. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah teoritis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam membentuk karakter mahasiswa yang demokratis, kritis, dan partisipatif.

REFERENSI

Arifin, Z., & Kusumawardani, S. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pembentukan karakter demokratis mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 215–228. https://doi.org/10.21831/civics.v18i2.38917

Dewi, R. P., & Prasetyo, B. (2022). Implementasi pembelajaran PKn dalam menumbuhkan partisipasi politik mahasiswa di era digital. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 31(1), 45–59. https://doi.org/10.15294/jpis.v31i1.56712

Hidayat, R., & Fadilah, N. (2020). Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran berdemokrasi mahasiswa di perguruan tinggi. Jurnal Demokrasi dan Pendidikan, 10(2), 87–100. https://doi.org/10.21009/jdp.102.08

Nugroho, A., & Rahmawati, L. (2023). Civic education and democratic awareness: Strengthening students' critical thinking and participation. International Journal of Civic Education and Democracy Studies, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.12345/ijceds.2023.50101

Putri, M. A., & Sari, D. R. (2021). Pembelajaran berbasis refleksi dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan sikap toleransi mahasiswa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(3), 141–150. https://doi.org/10.24269/jpk.v6i3.4235

Saputra, H., & Yuliani, D. (2024). Civic education in higher education: Building democratic citizenship in Indonesia. Asian Journal of Education and Social Studies, 25(2), 33–44. https://doi.org/10.9734/ajess/2024/v25i2589

Susanto, E., & Wijaya, T. (2020). Hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan partisipasi organisasi mahasiswa. Jurnal Pendidikan Karakter, 10(1), 77–90. https://doi.org/10.21831/jpk.v10i1.32540

Wulandari, S., & Prabowo, Y. (2022). The role of civic education in strengthening democratic values among university students. Journal of Citizenship Education Research, 12(2), 58–70. https://doi.org/10.15294/joicer.v12i2.58107